

SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS MENANGGAPI RASA ANTIPATI MASYARAKAT TERHADAP POLRI

Oleh : Wahyu Suhendra *)

A. PENDAHULUAN

Skripsi Wahyu Suhendra lulusan PTIK Angkatan XXIII/1988 ini oleh Tim Penguji yang diketuai oleh Letnan Jenderal Polisi Drs. Soejoed Binwahyoe dinilai cukup baik, terdiri dari 116 halaman paparan, 9 halaman awal, 9 halaman lampiran, 14 daftar kepustakaan, dan 5 halaman ringkasan. Riwayat Hidup penulisnya sebagaimana tertera dalam Daftar Isi ternyata tidak dilampirkan.

Untuk memantapkan analisisnya penulis telah terjun ke Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, dengan bimbingan Prof. Dr. Har-sya W. Bachtiar selaku Pembimbing Materi.

Analisis tersebut diketengahkan dalam bab III, IV, dan V yang terdiri dari:

- Mengenal beberapa aspek kehidupan masyarakat di Kelurahan

an Gandaria Utara.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan Polisi dan Masyarakat.
- Tinjauan terhadap masalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya analisis sosiologisnya dalam 6 halaman.

Melihat judul skripsi ini kita para Pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berhadap adanya paparan tentang adanya/eksistensi rasa antipati masyarakat terhadap POLRI sebagai bagian dari fakta aktual warna citra POLRI di kawasan tersebut. Dan tidaklah berlebihan apabila seluruh pembaca berharap lebih jauh lagi yakni diketemukannya gambaran analitik yang mikroskopis berdasarkan sejumlah pembekalan/pemantapan mata-mata kuliah yang diterima oleh penulis, khususnya mata kuliah Sosiologi dari dosen yang menjadi Pembimbing Materi skripsinya.

*) Disunting oleh Imam Soedjono, Pembantu "Bhayangkara".

B. ANALISIS SKRIPSI

Sebelum memulai analisis dalam bab III penulis mengawalinya dengan KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL dalam bab II yang tertuang dalam 18 halaman berupa teori-teori dan konsep-konsep perihal istilah sebagai berikut:

- TINDAKAN SOSIAL (Social Action) yang menurut Prof. Harsya W. Bachtiar berdasarkan Talcot Parson harus memenuhi syarat atau tolok ukur ada tidaknya keterkaitan unsur-unsur sebagai berikut yaitu:
 - Penggerak (motivation),
 - Manusia (yang dilukiskan penulis dalam gambar petani, Red.),
 - Keadaan (situation),
 - Aturan (norms), serta
 - Tujuan (goal).
- Unsur-unsur tersebut dikembangkan oleh Prof. Bachtiar dengan memperhatikan bagaimana pengalaman (experience) dan kepentingannya (interest).

Tindakan sosial tersebut harus menjadikan pertimbangan/perhitungan POLRI untuk melakukan tindakan sosial yang memperhatikan faktor keselarasan dan keseimbangan dalam suatu kehidupan bersama.

STRATIFIKASI SOSIAL.

Stratifikasi Sosial menurut penulis timbul karena adanya lapisan-lapisan dalam masyarakat

sesuai proses pertumbuhannya dalam mengejar tujuan bersama, dalam suatu sistem. Alasan terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah faktor kependaian, usia, pangkat, asli/tidak aslinya seseorang dalam kekerabatan, kedudukan, kekayaan, kemantapan emosi, pengetahuan, dan sebagainya. Untuk memantapkan analisis tentang sistem stratifikasi sosial ini penulis telah mengetengahkan kerangka teoritis Prof. Dr. Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- Sistem stratifikasi sosial mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat.
- Sistem tersebut dapat dianalisis dalam 6 ruang lingkup unsur-unsur sosiologis.

Penulis kemudian mengidentifikasi adanya 4 ukuran lapisan masyarakat sebagai obyek penelitiannya, yakni:

- Kekayaan,
- Kekuasaan,
- Kehormatan, serta
- Ilmu pengetahuan.

Di Gandaria Utara tidak diketemukan ukuran-ukuran yang bersifat khas, oleh sebab itu penulis cenderung lebih memperhatikan faktor-faktor "kedudukan" (status), "peranan" (role), dan "simbol-simbol kedudukan". Untuk ini penulis mengetengahkan pendapat-pendapat Pakar Sosiologi yakni Prof. Soerjono Soekanto dan Prof. Harsya W.

Bachtiar.

— POLISI DAN MASYARAKAT.

Dikaitkan dengan Ilmu Kepolisian maka hubungan sosiologis antara Polisi dan Masyarakat diangkat dari pandangan kesejarahan serta sudut hukum sebagaimana dijabarkan oleh Sitompul dan Syahperenong dalam bukunya HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA halaman 35 sampai dengan 36, dikaitkan dengan peranan POLRI. Sementara itu Hasan Shadily dalam SOSIOLOGI UNTUK MASYARAKAT INDONESIA diketengahkan dalam perumusan "masyarakat" dalam makna yang kurang lebih sama dengan istilah "community". Dikaitkan dengan hukum maka bersama Jaksa dan Hakim maka POLISI tidak dapat terlepas dari fungsi dalam rangka Criminal Justice System, di samping fungsi Hankam. Aspek dinamika (tertulis: dynamic) dalam suatu proses telah membuat peranan dan posisi POLRI menjadi penting di tengah masyarakatnya.

— PENEGAKAN HUKUM.

Kehidupan kemasyarakatan memerlukan keseimbangan nilai kepentingan individu dan nilai kepentingan umum, yang bersamaan tampil dengan nilai-nilai ketertiban, kelestarian, serta nilai "inovatisme", baik lisan maupun tertulis. Penegakan hukum mempunyai fungsi untuk menjumlahkan pandangan nilai-nilai

tadi ke dalam suatu hal yang kongkrit untuk terciptanya keserasian semua kepentingan tadi. Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo tentang "penegakan hukum" penulis telah mematrikskan keterlibatan POLRI dengan unsur-unsur Pembuat Undang-Undang, Penegakan Hukum, serta dengan Lingkungan. Proses penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukum dibuat, akan memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat hukum itu sendiri.

Atas dasar uraian tersebut maka penegakan hukum pada hakekatnya adalah keserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku yang mengarah ke kehidupan yang damai sehingga petugas hukum tidak hanya menerangkan perundang-undangan belaka. Singkatnya: Penegakan Hukum yang bertujuan terciptanya kedamaian dan keadilan merupakan kristalisasi Norma-Nilai-Pola Perilaku yang hidup di dalam masyarakat.

1. MENGENAL SITUASI WILAYAH, KEADAAN PENDUDUK, DAN PRASARANA YANG ADA, SERTA KASUS-KASUS YANG TERJADI.

Dengan paparan peta wilayah dalam Lampiran I (halaman 117) serta 10 tabel data yang berkaitan dengan tugas-tugas Kepolisian diperoleh gambaran akumulatif sebagai berikut:

a. Data Kejadian/Perkara-perkara April 1987 – Maret 1988:

- Pencurian : April = 2, Mei = 1, Juni = 4; Jumlah = 7 per Th.
- Perkelahian : April + Mei = 0, Juni = 1; jumlah = 1 per Th.
- Pembunuhan: April + Mei = 0, Juni = 1; jumlah = 1 per Th.
- Perampokan : April = 1, Mei dst. nya = 0; jumlah = 1 per Th.
- Kebakaran : April + Mei = 0, Juni = 1; jumlah = 1 per Th.

b. Tingkat gangguan Kamtibmas:

- Pencurian : Tahun 1986 = 1; Penodongan s/d Kamtib DKI lain = 0.
- Pencurian + Penodongan tahun 1987: Pencurian = 1, Penodongan = 1.

2. SISTEM PELAPISAN SOSIAL.

Paparan Sistem Pelapisan Sosial di sini merupakan sintesa dan analisis data Sistem Pelapisan Sosial yang terdapat dalam:

- a. Masyarakat di Kelurahan Gandaria Utara, dan
- b. Lingkungan POLRI di wilayah tersebut.

Dengan mengacu kepada pendapat Prof. Dr. Soerjono Soekanto tentang "Ukuran Kedudukan Sosial", berbagai wawancara yang disimpulkan oleh penulis, serta 8 tabel (tentang Sarana Pendidikan, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang sifatnya Non-Formal serta

Formal, Banyaknya sarana pendidikan, Jumlah Perguruan Tinggi yang ada, Kursus-kursus dan Pendidikan Non-Formal, Sarana Kepe mudaan/Kepramukaan, dan Jumlah Sarana dalam forum Keagamaan), penulis memberikan paparan sebagai berikut:

a. Sistem Pelapisan Sosial Masyarakat Kelurahan Gandaria Utara.

Sistem Pelapisan Sosial di sini menggunakan tolok ukur sebagai berikut:

1). Ukuran Kekayaan.

Penulis memperoleh data yang kemudian diklasifikasikan menjadi Tingkat Atas (25%), Tingkat Menengah (40%), dan Tingkat Bawah (35%). Identifikasi golongan terakhir adalah apabila pendapatannya itu hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.

2). Ukuran Kekuasaan.

Ukuran kekuasaan di Gandaria Utara erat kaitannya dengan kedudukan seseorang, karena keduanya mengandung kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Dan untuk ini penulis menyitir pendapat Prof. Soerjono Soekanto dalam bukunya SOSIOLOGI, SUATU PENGANTAR yang berbunyi:

Kedudukan sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda akan tetapi kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

3). Ukuran Kehormatan.

Apabila dalam butir a2) di Gandaria Utara dilukiskan adanya penampilan 9 pejabat (Sipil, ABRI, dan Pengusaha) yang karena kedudukannya berperan dalam kekuasaan, maka disebutkan bahwa orang-orang terhormat terdiri dari kalangan Alim Ulama (Ustadz), 5 tokoh aktivis dalam organisasi sosial politik, kemudian para orang kaya. Kaum Ningrat/bangsawan telah "tenggelam" di kawasan Gandaria Utara ini.

4). Ukuran Tingkat Ilmu Pengetahuan.

Lebih dari 60% penduduk telah terdidik baik formal, non-formal, maupun swasta dan pengetahuan mereka itu terus bertambah oleh adanya lembaga Kepramukaan, Keagamaan, serta sasana/fasilitas yang ada di situ.

b. Sistem Pelapisan Sosial yang ada di lingkungan Polri.

Kekuatan personil POLRI di POLSEK Kebayoran Baru yang langsung menangani Kelurahan Gandaria Utara sejumlah 139 orang, di samping kelurahan-kelurahan lainnya. Pangkat Tertinggi di POLSEK adalah Mayor dan terendah adalah Bharatu, bertugas di wilayah seluas 1.280.899 Ha (144,54 Ha di antaranya adalah luas Gandaria Utara).

3. GERAK SOSIAL (SOCIAL MOBILITY).

Ada 5 (lima) sumber yang dipergunakan penulis guna perumusan istilah "gerak sosial" yakni Kimball Young & Raymond W. Mack, Henry P.F. Soerjono Soekanto, dan Kapten Pol. Anjaya; yang langsung maupun tak langsung dikaitkan kondisiantisipasi POLRI dalam menciptakan suasana Kamtibmas yang dituntut masyarakat. Gerak sosial ini da-

pat horisontal serta vertikal. Definisi horisontal maupun vertikal Prof. Soerjono dikutip tidak berbeda oleh penulis (halaman 48), dan baru menjadi jelas pada uraiannya di halaman 50. Urbanisasi sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk serta kondisi kerawanan wilayah dikaitkan dengan

gerak sosial vertikal menjadikan salah satu penyebab banyaknya kejahatan pencurian perlengkapan/ isi kendaraan bermotor menjadi cukup tinggi (+ 11-12 kasus dalam sebulan).

4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HUBUNGAN POLISI DAN MASYARAKAT DI KELURAHAN GANDARIA UTARA.

a. LATAR BELAKANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.

Penelitian sosiologis tentang hubungan Polisi dan Masyarakat di Indonesia belum memadai, khususnya yang membantu memperbaiki Polisi. Dari buku A.F. Brondstatler & L.A. Rodekt yang berjudul POLICE AND COMMUNITY RELATIONS (yang di dalamnya memuat pula hasil penelitian Kepala Polisi Atlanta, Georgia atas Polisi AS tahun 1961-an) disimpulkan bahwa "melaksanakan tugas Polisi di kebanyakan masyarakat muncul dalam keadaan penelitian yang dinamis antara kekuatan yang cenderung mengisolasi dan kekuatan lain yang cenderung mengintegrasikan fungsinya dengan struktur-struktur lainnya".

Di Gandaria Utara telah

terjadi isolasi yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1). Kondisi batiniah anggota masyarakat yang pernah berhubungan dengan Polisi terganggu karena "ada suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang berakasi suatu gangguan terhadap keterangan atau ketentrangan (pribadi)".
- 2). Citra masyarakat awam atas perbuatan Polisi yang selalu disertai dengan kekerasan dan paksaan telah demikian menonjol dan dalam segala interaksi selalu menimbulkan rasa takut.
- 3). Stigmatisasi yang relatif tinggi di Gandaria Utara cenderung membuat masyarakat membatasi proses-proses interaksi sosial dengan Polisi. Sering berhubungan dengan Polisi dapat di "cap" sebagai penyelewengan norma/hukum.
- 4). Kondisi berdasarkan kebijaksanaan Atasan yang "memaksa" Polisi membatasi hubungan sosial dengan golongan masyarakat ter-

tentu, yang sebenarnya bertujuan mengeliminir berbagai pengaruh negatif terhadap Polisi.

Ternyata dari keadaan isolasi interaksi tersebut dapat diidentifikasi beberapa keuntungan sebagai berikut:

- 1). Hubungan (yang terbatas) formal dalam interaksi sosial dengan Polisi merupakan faktor mantap yang menguntungkan penegakan hukum.
- 2). Kondisi isolasi memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi Polisi untuk melaksanakan fungsi sebagai "pelopor perubahan".
- 3). Kondisi isolasi membuat pelaksanaan tugas Polisi dan kekuatan anti Polisi berjalan paralel dan damai (tanpa friksi).
- 4). Teknis profesionalisme Kepolisian lebih mungkin dikembangkan tanpa gangguan.

b. FAKTOR-FAKTOR SOSIAL YANG EKSTRIM.

Selain butir a di atas hubungan Polisi dan Masyarakat di Gandaria sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi.

Dengan menyitir pakar-pakar

ekonomi seperti Edward E. Schattschneider dan Victor G. Storch penulis menyimpulkan bahwa keterbatasan-keterbatasan ekonomis penunjang tugas Kepolisian di satu pihak merupakan sumber terjadinya pungutan liar (pungli) dan pemerasan, akan tetapi di lain pihak dapat pula tercipta budaya kerelaan masyarakat untuk menjadi sukarelawan pemasok/penyumbang dana kelangkaan tadi.

2) Faktor Pengaruh Lingkungan.

Dari sisi tertib lalu lintas diperoleh data selalu adanya gangguan hubungan Polisi dan Masyarakat pelanggaran peraturan di pertigaan Jl. Radio Dalam ke arah Pondok Indah.

3) Faktor Sistem Nilai.

Modernisasi membawa dampak perubahan serta dinamika sosial. Prof. Soerjono Soekanto menunjuk adanya proses disorganisasi, transformasi, dan irama proses itu sendiri, sehingga terjadilah perkembangan nilai dalam suatu sistem. Oleh Kepolisian RI (litbang Polri, 1979) berbagai sistem yang dinamis itu dihimbau untuk dianggap sebagai kriteria yang perlu dipilih dalam rangka men-

capai tujuan tugas POLRI. Jelaslah bahwa dinamika sistem nilai itu mutlak perlu diperhatikan. Di Gandaria Utara nilai-nilai kehidupan setempat diwarnai oleh dinamika yang bersumber dari norma Agama Islam, norma Budaya Betawi, sedikit dari Jawa dan Sunda; serta norma budaya Asing Cina sebagaimana terlihat dari kehidupan WNI keturunan Cina.

4) Faktor Struktur Sosial.

Analisis penulis ditunjang oleh pendapat Prof. Selo Soemardjan, Drs. Soejoed Binwahjoe, dan Drs. Moch. Sanoesi, yang diidentifikasi dalam 3 (tiga) pola, yakni:

- a) Pola struktur sosial dan kebudayaan sederhana.
- b) Pola struktur sosial dan kebudayaan madya.
- c) Pola struktur sosial dan kebudayaan Pra Modern/Modern.

Dalam pola struktur sosial dan kebudayaan (Sosbud) Sederhana semakin jarang POLRI melakukan anjaksanaan/sambang Desa semakin memperbesar ketidak acuhan masyarakat terhadap POLRI. Dalam pola struktur Sosbud Madya POLRI dalam melaksanakan tugasnya ber-

hadapan dengan semakin berkembangnya "pengelompokan masyarakat" dengan kepentingan serta tujuan yang berbeda-beda sebagaimana nampak dalam Organisasi-organisasi masyarakat (Ormas) termasuk kerawitan dan pencak silat, yang kesemuanya membawa perkembangan sistem nilai yang pada waktu ini mengakibatkan proses ISOLASI yang kuat. Dalam pola struktur Sosbud Modern terlihat adanya heterogenitas sosial dengan tuntutan hak-hak asasi manusianya berhadapan dengan hakekat penegakan hukum oleh POLRI, termasuk kebijaksanaan "dari atas" yang dapat membantu penerapan diskresi oleh POLRI di lapangan.

5) Faktor-Faktor Sosial yang Intern.

Paparan hal ini diawali dengan penjabaran Prof. Sattijpto Rahardjo tentang "perwujudan tujuan-tujuan hukum melalui organisasi-organisasi" (tabel 20) dan "birokrasi organisasi Polri serta kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi" (tabel 21) bagi Polri, yang selanjutnya dirinci faktor-faktor kemasyarakatan yang dominan dalam tubuh Polri sendiri, yakni:

- a) Faktor Kebudayaan POLRI.

- b) Faktor Struktur Organisasi.
- c) Faktor diskresi sebagai suatu pengambilan keputusan.

Segala jenis faktor sosial intern berdampak kepada baik buruknya citra POLRI. Oleh sebab itu masalah pendidikan dan pengetahuan dasar serta faktor psikologis (u.p. pengendalian emosi dan budaya hubungan kekeluargaan) anggota POLRI merupakan faktor penentu yang perlu mendapatkan perhatian.

6) Tanggapan dari Berbagai Kalangan Masyarakat terhadap POLRI.

Kompilasi "pendapat umum" masyarakat Gandaria Utara dapat dililhkan menjadi tanggapan yang berasal dari dua kelompok yakni mereka yang pernah dan mereka yang belum pernah berhubungan dengan Polisi, yang masing-masing dikategorikan berdasarkan pendidikan yang pernah dienyamnya sebagai berikut:

- a. Dari masyarakat yang belum pernah berurusan dengan Polisi.
 - 1) Ada 3 (tiga) nara sumber penanggap berpendidikan Sekolah Dasar yang secara umum ber-

pendapat:

Pelayanan Polisi dinilai kurang memuaskan, sudah bagus, dan lain menyatakan cukup baik; ketiganya mempunyai harapan atas pelayanan Polisi yang lebih baik di masa mendatang.

- 2) Seorang penanggap lulusan SLTA berpendapat meskipun jumlah Polisi kurang pelayanan cukup memuaskan.
- 3) Dua orang penanggap yang pernah berpendidikan tinggi berbicara lugas tentang citra Polisi, lebih lugas daripada butir 1) dan 2); yang satu menyatakan cukup baik, yang lain menilai citra POLRI baik.

b. Dari masyarakat yang pernah berhubungan dengan Polisi.

Pada umumnya pendapat tentang pelayanan dan citra POLRI sama dengan mereka yang belum pernah berurusan dengan Polisi namun harapan mereka lebih tajam sebagai berikut:

- 1) Seorang berpendidikan SD berharap agar Polri bertindak lebih tegas namun tidak "over-acting".

- 2) Lima orang berpendidikan SLTA menyatakan harapannya agar Polisi mendatang lebih berfungsi pengayom, "jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga", agar berfungsi ACDC (Aktif, Kreatif, Dinamis, Collectif) dalam statusnya selaku pelindung masyarakat, agar lebih berdisiplin dalam penegakan hukum, dan agar Polisi lebih sering berada di kawasan rawan dengan sikap lebih ramah.
- 3) Empat anggota masyarakat yang pernah duduk di Perguruan Tinggi dengan lebih berbobot menyatakan harapannya agar POLRI dapat menjadi pelindung dan penegak hukum yang konsekuen, abdi hukum yang tidak "sok kuasa", bertindak sebagai teman akrab masyarakat yang terpercaya, dan agar dapat bertindak konsekuen POLRI perlu ditambah personilnya.

Tanggapan-tanggapan tersebut menurut penulis perlu menjadi

kan masukan untuk mawas diri guna meningkatkan ek-sistensi POLRI sebagai panutan lingkungannya.

5. TINJAUAN TERHADAP MASALAH PENEGAKAN HUKUM.

Prof. Satjipto Rahardjo menggambarkan Polisi sebagai "hukum yang hidup" yang harus menegakkan hukum, orang lain melontarkan anekdot bahwa Polisi itu satu kakinya di penjara dan yang lain di kuburan, sementara gambaran Polisi AS adalah tokoh yang dikagumi tetapi sekaligus juga ditakuti. Dan gambaran-gambaran itu tidak membuat tugas POLRI sebagai penegak hukum yang mampu menciptakan suasana tertib dan damai, tidaka bergeming.

a. TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM DARI ASPEK SOSIOLOGIS.

Dalam bukunya MASALAH PENEGAKAN HUKUM, SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS, Prof. Satjipto Rahardjo menonjolkan pendapat Skolnik yang menyatakan bahwa "Tugas Polisi di lapangan adalah suatu peradilan tanpa melalui proses peradilan".

Sejalan dengan wawancara dengan tiga tokoh masyarakat Gandaria Utara (Lurah, Kapolsek, dan Tokoh lain) terkesan adanya tun-

tutan sosiologis bahwa selain Hukum Formal/Positif perlu dipatuhi aturan normatif lain yang berlaku setempat demi terciptanya ketertiban serta ketentraman masyarakat tersebut.

b. MENINJAU USAHA-USAHA DAN UPAYA POLRI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH KELURAHAN GANDARIA UTARA.

Oleh penulis telah dijabarkan bahwa seluruh personil POLRI dalam tugasnya di Gandaria Utara telah melaksanakan tugas fungsionalnya secara maksimal mulai tingkat Tamtama sampai Perwira. Dan secara fisik pembinaan Siskam Swakarsa, pembinaan Polsus, Satpam, serta Banpol telah berjalan baik; sementara itu di Gandaria Utara telah terdapat 34 Pos Kamling di RT-RT serta RW-RW.

6. KESIMPULAN DAN SARAN.

Ada 6 butir kesimpulan serta 5 butir saran penulis sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

- 1) Rasa antipati, sinisme, dan sebagainya dari masyarakat kepada POLRI timbul karena ikut-ikutan kepada mereka yang memperoleh

pengalaman kurang baik dengan POLRI.

- 2) Kadar intensitas hubungan dengan POLRI menentukan penilaian baik-buruk-sedang mutu hubungan masyarakat dan POLRI.
- 3) Kadar kejadian dan situasi permasalahan sosial akan memperoleh pelayanan serta penanganan yang lebih baik manakala perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) POLRI memenuhi kadar tuntutan tersebut.
- 4) Penegakan hukum dan masalah diskresi yang semakin kompleks di lapangan telah membawa kerawanan citra POLRI.
- 5) Ketidak taatan kepada hukum berikut latar belakangnya secara umum terdapat pula di Gandaria Utara.
- 6) Pendekatan hubungan yang persuasif menguntungkan dan proses isolasi POLRI telah memperburuk hubungan masyarakat dengan POLRI.

b. Saran :

Saran diberikan dalam wawasan yang tidak langsung berakar dari penelitian penulis di Gandaria Utara sebagai berikut:

- 1) Perlakuan, pelayanan,

pemberlakuan hukum yang sama oleh POLRI.

- 2) Dalam situasi darurat perlu pengerahan kekuatan personil ke TKP, datang cepat, dan hubungan dengan masyarakat dilembagakan.
- 3) Demi Kamtibmas diperlukan hubungan baik yang komunikatif disertai langkah-langkah tepat setelah menerima informasi dari masyarakat.
- 4) Setiap anggota POLRI dalam situasi serumit apapun dalam hubungannya dengan masyarakat wajib mengupayakan:
 - a) Hilangnya rasa antipati masyarakat.
 - b) "Rasa suka kepada Polisi".
- 5) (Halaman terpisah/131) Untuk itu POLRI perlu semakin sering memberikan informasi agar masyarakat memahami dan menghayati beratnya tugas-tugas Polisi.

C. PENUTUP.

Demikian sari pati analisis Saudara Drs. Wahyu Suhendra tentang "rasa antipati" masyarakat terhadap POLRI dengan fokus Gandaria Utara. Tanpa menyebut perlunya "rasa simpati" dimunculkan (istilah penulis: "rasa suka kepada Polisi") dengan berbagai upaya lokal Kelurahan Gandaria Utara, maka baik kesimpulan maupun saran dalam skripsi ini telah ikut arus "generalisasi" permasalahan ketidakserasian hubungan Polisi dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Gandaria Utara terkesan tidak berbeda dengan Kelurahan-Kelurahan lain di DKI Jakarta sebagaimana terlihat adanya karakteristik sosial yang menonjol serta fenomena-fenomena sosiologisnya yang dapat mempertajam analisis penulis guna mengantisipasi sikap dan tingkah laku POLRI di Jakarta khususnya serta di Indonesia umumnya, khususnya menghadapi kecenderungan perlunya penguasaan IPTEKPOL dalam dekade mendatang.